

Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum di Kota Tegal

Studi tentang Karakteristik Sosial Psikologis, Persepsi
dan Harapan Masyarakat terhadap Pemilu di Dua
Kelurahan Kecamatan Margadana Kota Tegal

L a p o r a n P e n e l i t i a n



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
2015**

Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum di Kota Tegal

Studi tentang Karakteristik Sosial Psikologis, Persepsi dan Harapan Masyarakat terhadap Pemilu di Dua Kelurahan Kecamatan Margadana Kota Tegal

Laporan Penelitian



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

2015

Kata Pengantar

Pemilu merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui prosesi pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan, dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu.

Dalam konteks pemilu, perilaku pemilih menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji. Oleh karena itu, kajian atas perilaku pemilih bermanfaat untuk melihat dan memahami konstelasi harapan dan kepentingan masyarakat dalam konteks politik demokratik.

Sekaitan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada perilaku masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan, yang partisipasinya dalam pemilu selalu rendah. Upaya ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang: (1) karakteristik sosial dan psikologi; (2) persepsi terhadap karakteristik institusional pemilu; dan (3) harapan anggota masyarakat pemilih terhadap pemilu.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi sejak proses awal hingga terwujudnya laporan penelitian ini, kami menyampaikan penghargaan dan rasa hutang budi yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih mengandung banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan konstruktif dari pihak manapun sangat kami nantikan.

Akhirulcaram semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi kita.

Tegal, 31 Juli 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kehidupan berpolitik di Indonesia pada pasca reformasi ini telah mengalami pergeseran yang signifikan. Salah satu aspek penting dari kehidupan berpolitik tersebut adalah partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik merupakan faktor penentu iklim demokrasi dan tatanan kehidupan berdemokrasi.

Partisipasi politik tersebut antara lain berbentuk penunaian hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum. Hal tersebut mencerminkan tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat. Selain itu, dapat pula memberikan legalitas atas kondisi sosial politik dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sejak tahun 1955 sampai dengan 2014. Pada pemilu 1955, partisipasi pemilih mencapai 91,41% dari total pemilih terdaftar 43.104.464 jiwa. Selanjutnya, pemilu legislatif 1971, yang merupakan pemilu pertama orde baru, mencapai tingkat partisipasi tertinggi yaitu 96,62% dari pemilih terdaftar sebanyak 58.558.776 jiwa.

Partisipasi pemilih dalam pemilu 1977 mencapai 96,52% dari pemilih terdaftar sebanyak 69.871.092 jiwa; pemilu 1982 sebesar 96,47% dari 82.132.195 jiwa; pemilu 1987 96,43% dari 93.737.633 jiwa. Pemilu 1992 sebanyak 95,06 dari 107.565.413 jiwa; pemilu 1997: 93,55% dari 125.640.987 jiwa; pemilu 1999: 92,74 dari 118.158.778 jiwa. Partisipasi pemilu legislatif 2004 mencapai 84,07% dari 148.000.369 jiwa; pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih mencapai 70,09%.

Banyak faktor untuk menjelaskan pasang surut partisipasi pemilih tersebut. Dari perspektif kajian perilaku pemilih, gejala tersebut dapat dijelaskan dengan konsep utama perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak

memilih (*non-voting behavior*). Pendapat David Moon yang dikutip oleh Saleh (2007) menyatakan bahwa perilaku *non-voting* dapat ditelaah dengan dua pendekatan teoritik. Pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu. Kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

Perilaku tersebut terjadi pula dalam pemilu di daerah seperti Kota Tegal. Pemilu 2014 di kota dengan empat kecamatan dan 419 TPS itu, meraih partisipasi pemilih 69% (dari 198.069 pemilih) untuk pemilu legislatif; dan 67% (dari 203.366 pemilih) untuk pemilu presiden.

Sangat menarik bahwa partisipasi masyarakat nelayan yang diperkirakan akan rendah, justru mencapai 72%. Persentase tersebut diraih di TPS-TPS basis nelayan seperti Kelurahan Tegalsari dan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat. Sementara di perkampungan para pengusaha Warteg, yaitu Kelurahan Krandon, dan Cabawan (Kecamatan Margadana), partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden selalu rendah, yaitu 33-36%.

Apakah kondisi rendahnya partisipasi pemilih di daerah tersebut akan terus berulang? Selain kesibukan mencari nafkah, adakah faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih tersebut. Masalah pokok inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Rendahnya partisipasi dalam pemilu, dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai perilaku *non-voting* yang secara teoretik disebabkan oleh banyak faktor. Sekaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan berkonfirmasi di tingkat empirik, yaitu dengan anggota masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan, yang partisipasinya dalam pemilu selalu rendah. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Bagaimanakah karakteristik sosial dan psikologi anggota masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan?

2. Bagaimanakah persepsi anggota masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan terhadap karakteristik institusional pemilu?
3. Bagaimanakah harapan anggota masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan atas keputusan mereka untuk memilih dan tidak memilih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Krandon dan Cabawan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014, serta kecenderungannya pada pemilu yang akan datang. Untuk itu, melalui penelitian ini akan diidentifikasi tentang: (1) karakteristik sosial dan psikologi masyarakat pemilih di dua kelurahan tersebut; (2) persepsi masyarakat terhadap karakteristik institusional pemilu; (3) harapan masyarakat atas keputusan mereka untuk memilih dan tidak memilih.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai landasan empirik dalam kerangka perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu, khususnya di Kota Tegal.

BAB 2

Penjelasan Teoretik: Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

A. Konsep Partisipasi Politik Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat dapat didefinisikan ke dalam berbagai dimensi. Pendapat Mikkelsen yang dikutip oleh Soetomo (2006) misalnya, memerinci enam jenis tafsiran mengenai partisipasi masyarakat, yaitu:

- (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program pembangunan tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- (2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek atau program-program pembangunan.
- (3) Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- (4) Partisipasi adalah penetapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek/program agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- (5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Hasil penelitian Goldsmith dan Blustain tahun 1980 di Jamaica sebagaimana dikutip oleh Ndraha (1990), berkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- (1) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat.
- (2) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Adapun partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa (Huntington dan Nelson, 1994).

Dengan kata lain, bahwa secara umum partisipasi politik dapat dinyatakan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan orang-orang dalam kegiatan politik. Kegiatan politik itu beragam dalam bentuk dan substansinya. Salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Dalam definisi Bolgherini (2010), partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Partisipasi politik masyarakat dipengaruhi politik sistem politik di suatu negara. Partisipasi politik di negara demokrasi liberal berbeda dengan di negara komunis atau otoritarian. Bahkan, hasil penelitian Luengo (2006), menunjukkan bahwa di negara-negara demokrasi liberal di Eropa pun terdapat perbedaan partisipasi politik warganya. Warganegara Eropa Utara cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya daripada negara-negara Eropa bagian selatan.

B. Perilaku *Non-Voting*

Dalam era reformasi ini, pemilu dipahami sebagai arena persaingan terbuka antarpeserta pemilu untuk memobilisasi dukungan suara pemilih. Oleh karena itu, pemilih berada pada posisi yang sejajar/setara dengan elemen lainnya. Peserta pemilu membutuhkan dukungan pemilih, begitu juga dengan penyelenggara pemilu yang berusaha meningkatkan keterlibatan pemilih dalam

pemilu. Belum terakomodasinya kepentingan dan harapan pemilih telah mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia.

Perilaku *non-voting* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah golongan putih atau golput. Ali (1999) membagi golput di Indonesia menjadi dua kelompok.

Pertama, kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, adalah kelompok golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). Pandangan David Moon sebagaimana dikutip oleh Saleh, (2007) mengatakan ada dua pendekatan teoretik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: *pertama*, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan *kedua*, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Menurut Sanit (1992), golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. Sikap orang-orang golput dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih.

Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara

dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

Sejalan dengan pendapat di atas, Fatah (dikutip oleh Fathah, dalam *lampungpost.com*) mengklasifikasi golput ke dalam empat golongan berikut ini.

Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Keempat*, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Dapat diringkaskan bahwa golput adalah mereka yang dengan sengaja dan untuk suatu maksud dan tujuan yang jelas, menolak memberikan suara dalam pemilu. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di TPS hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, tidak dapat dikategorikan sebagai golput.

BAB 3

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang tidak untuk menguji hipotesis, tetapi mendeskripsikan dan menganalisis data, fakta dan keadaan atau kecenderungan yang ada. Oleh karena itu, digunakan pendekatan deskriptif, yaitu berusaha memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual melalui pengumpulan data, penyusunan data yang akhirnya dijelaskan dan dianalisis.

Pendekatan deskriptif dipilih karena dapat: (1) mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis kondisi subjek di lokasi penelitian; (2) menggambarkan dan menafsirkan data yang telah diperoleh di lapangan baik berkaitan dengan antar-data maupun kecenderungan pengembangannya; dan (3) memecahkan permasalahan aktual melalui data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dianalisis.

Hal itu sejalan dengan syarat-syarat umum pendekatan deskriptif yang dijelaskan oleh Surakhmad (1989) yaitu: (1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis, oleh karenanya disebut pula sebagai metode analitik

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam rangka pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara terus menerus dengan responden dalam berbagai situasi, meskipun kadangkala dilakukan pula dalam situasi yang khusus. Pelaksanaan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang memadai sehubungan dengan pokok masalah penelitian yang telah diidentifikasi.

Jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini merujuk kepada klasifikasi Koentjaraningrat (1986), yaitu wawancara yang

bersifat “*unstructured*” atau wawancara yang terfokus pada suatu masalah tertentu (*focused interview*); dan wawancara bebas (*free interview*) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berpindah-pindah dari satu pokok ke pokok lain, sepanjang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menjelaskan aspek-aspeknya.

2. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan wawancara, pengumpulan data penelitian ini menggunakan pula studi dokumen, sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk melakukan pengecekan kesesuaian data. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria sebagai berikut: keotentikan isi dokumen, isi dokumen dapat diterima sebagai suatu kenyataan; dan kecocokan atau kesesuaian data untuk menambah pengertian tentang masalah yang diteliti.

3. Angket

Angket merupakan teknik sekaligus instrumen pengumpulan data yang memuat daftar pertanyaan terperinci dan lengkap serta berisi pertanyaan tentang fakta-fakta yang dianggap dikuasai oleh responden. Pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan terdiri atas lima opsi, yang disusun dari peringkat tertinggi (skor 5) sampai dengan terendah (skor 1).

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh adalah anggota masyarakat yang pada pemilu (legislatif dan presiden) tahun 2014 dicatat sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Untuk mengambil sampel digunakan prosedur pengambilan sampel secara bertahap. Tahap pertama menentukan TPS-TPS sebagai sampel wilayah, menggunakan prosedur *random sampling*. Tahap selanjutnya, dari masing-masing sampel wilayah tersebut ditentukan sampel orang sebagai responden masing-masing berproporsi 2,5%. Sedangkan penunjukkan subyek sampel sebagai responden penelitian ditentukan secara acak berdasarkan undian.

Untuk lebih jelasnya, prosedur pengambilan sampel tersebut penulis ringkaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
PROSEDUR PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN

Kelompok Populasi	Prosedur Pengambilan Sampel		Jumlah Sampel
	Tahap I	Tahap II	
Anggota Masyarakat yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2014	Random (TPS di dua Kelurahan)	Proporsional (masing-masing anggota subpopulasi pada setiap TPS diambil 2,5%-nya)	68

D. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisis menggunakan teknik statistika deskriptif, khususnya perhitungan persentase. Terhadap data kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi, dianalisis dengan pemaknaan deskriptif.

BAB 4

Deskripsi dan Interpretasi Data

A. Posisi Lokasi Penelitian dalam Konteks Kondisi Umum Kota Tegal

1. Kondisi Geografis

Kota Tegal terletak antara 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 6°50'- 6°53' Lintang Selatan. Letak geografisnya bernilai strategis, karena berada di antara tiga jalur yang menghubungkan kota-kota besar yaitu Purwokerto-Tegal-Jakarta; Semarang-Tegal-Jakarta; dan Purwokerto-Tegal-Semarang.

Secara administratif wilayah Kota Tegal berbatasan dengan Laut Jawa (sebelah Utara); Kabupaten Tegal (sebelah Selatan); Kabupaten Pemalang (sebelah Timur); serta Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes (sebelah Barat).

Luas wilayah Kota Tegal relatif kecil, yaitu 39,68 km² atau sekitar 0,11% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal secara administrasi dibagi menjadi empat wilayah kecamatan dan 27 kelurahan yang terdiri atas 159 Rukun Warga (RW) dan 1.071 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Tegal Barat merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kota Tegal, yaitu 13,95 Km², disusul Kecamatan Margadana luas wilayah seluas 11,76 km², kemudian Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur dengan luas wilayah masing-masing seluas 6,43 km² dan 6,36 km².

Topografi Kota Tegal terbagi dalam dua bagian yaitu daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah Utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan di sebelah Selatan merupakan daerah dataran rendah. Rata-rata elevasi ketinggian di wilayah Kota Tegal antara 0-7 meter di atas permukaan air laut dengan kemiringan sungai rata-rata 0-2%.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kelurahan Kota Tegal

Kecamatan	Luas (Ha)
Tegal Selatan	643
1. Kel. Kalinyamat Wetan	89

Kecamatan	Luas (Ha)
2. Kel. Bandung	59
3. Kel. Debong Kidul	35
4. Kel. Tunon	75
5. Kel. Katuren	62
6. Kel. Debong Kulon	74
7. Kel. Debong Tengah	111
8. Kel. Randugunting	138
Tegal Timur	636
1. Kel. Kejambon	86
2. Kel. Slerok	139
3. Kel. Panggung	223
4. Kel. Mangkukusuman	047
5. Kel. Mintaragen	141
Tegal Barat	1513
1. Kel. Pesurungan Kidul	72
2. Kel. Debong Lor	56
3. Kel. Kemandungan	56
4. Kel. Pekauman	96
5. Kel. Kraton	123
6. Kel. Tegalsari	219
7. Kel. Muarareja	891
Margadana	1176
1. Kel. Kaligangsa	253
2. Kel. Krandon	120
3. Kel. Cabawan	128
4. Kel. Margadana	241
5. Kel. Kalinyamat Kulon	152
6. Kel. Sumurpanggung	100
7. Kel. Pesurungan Lor	182
Jumlah	3.968

Sumber : Kota Tegal dalam Angka Tahun 2012

Kota Tegal beriklim tropis dan bersuhu udara relatif panas. Temperatur udara rata-rata per bulan mencapai 28,4°C dengan suhu minimum mencapai 24,70°C dan suhu maksimum mencapai 32,20°C. Sedangkan rata-rata hari hujan per bulannya adalah 12 hari dengan jumlah curah hujan rata-rata 131 Mm.

Pemanfaatan lahan di Kota Tegal terbagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah yang meliputi bangunan dan pekarangan, tegalan/kebun, tambak, dan lain-lain. Angka-angka dalam tabel 3.2 menunjukkan bahwa luas sawah di Kota Tegal adalah 859,65 Ha dan luas tanah kering (pekarangan/bangunan, tegalan/kebun, lain-lain dan tambak) 3.108,35 Ha.

Tabel 4.2. Penggunaan Lahan di Kota Tegal

Kecamatan	Lahan Sawah	Bangunan/ Pekarangan	Tegal/ Kebun	Tambak	Lain-lain
Tegal Selatan	137,40	451,34	0,50	0,00	53,76
1. Kel. Kalinyamat Wetan	28,00	54,77	0,00	0,00	6,23
2. Kel. Bandung	13,50	41,35	0,00	0,00	4,15
3. Kel. Debong Kidul	0,00	34,12	0,00	0,00	0,88
4. Kel. Tunon	0,00	73,00	0,00	0,00	2,00
5. Kel. Keturen	27,33	20,94	0,00	0,00	3,73
6. Kel. Debong Kulon	57,57	24,48	0,00	0,00	1,45
7. Kel. Debong Tengah	8,00	97,71	0,00	0,00	5,29
8. Kel. Randugunting	3,00	104,97	0,00	0,00	30,03
Tegal Timur	25,00	409,07	29,2	42,34	130,39
1. Kel. Kejambon	2,00	70,99	0,00	0,00	15,01
2. Kel. Slerok	19,00	101,45	0,00	0,00	17,55
3. Kel. Panggung	4,00	89,12	20,42	38,34	69,12
4. Kel. Mangkukusuman	0,00	43,30	0,00	0,00	3,70
5. Kel. Mintaragen	0,00	104,21	7,95	4,00	25,01
Tegal Barat	68,00	489,19	7,42	417,40	530,99
1. Kel. Pesurungan Kidul	25,00	20,65	0,00	0,00	28,35
2. Kel. Debong Lor	14,00	34,49	1,51	0,00	6,05
3. Kel. Kemandungan	5,28	22,88	3,60	0,00	22,52
4. Kel. Pekauman	1,93	74,89	0,00	0,00	18,11
5. Kel. Kraton	21,79	77,55	0,42	0,00	21,03
6. Kel. Tegalsari	0,00	169,32	1,89	29,65	18,13
7. Kel. Muarareja	0,00	89,41	0,00	387,75	416,80
Margadana	629,25	423,83	5,45	28,87	88,60
1. Kel. Kaligangsa	175,00	66,68	4,14	0,00	7,18
2. Kel. Krandon	70,00	39,49	0,00	0,00	10,51
3. Kel. Cabawan	70,00	47,71	0,00	0,00	10,29
4. Kel. Margadana	103,25	83,94	0,00	15,45	37,36
5. Kel. Kalinyamat Kulon	90,00	48,60	0,00	0,00	14,40
6. Kel. Sumurpanggung	21,00	74,62	1,31	0,00	3,07
7. Kel. Pesurungan Lor	100,00	62,79	0,00	13,42	5,79
Jumlah	859,65	1.773,43	42,57	801,01	510,9

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2012

2. Kondisi Demografis dan Sarana Sosial Budaya

Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2012 dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2009 untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 1,025%, dan pada tahun 2009 untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 1,024%.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Tegal (2008-2012)

Jenis Kelamin	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Laki-laki	123.573	126.735	119.367	119.899	121.070
Perempuan	123.561	126.540	121.173	121.811	122.660
Jumlah	247.134	253.275	240.540	241.710	243.730

Sumber : Kota Tegal dalam Angka 2012

Persebaran penduduk Kota Tegal yang terbesar berada di Kecamatan Tegal Timur yaitu mencapai 31%, kemudian di wilayah Kecamatan Tegal Barat

26,02%, Kecamatan Tegal Selatan 24,02%, dan jumlah penduduk terendah ada di wilayah Kecamatan Margadana yaitu 18,96%.

Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Tegal pada tahun 2010 adalah 6.062 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan yaitu 14.357 jiwa/Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sebesar 692 jiwa/Km². Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah RT/RW di Kota Tegal

Kecamatan/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah RT RW	
				RW	RT
Tegal Selatan	6,43	59.645	9.276	42	239
Kalinyamat Wetan	0,89	4.117	4.626	4	17
Bandung	0,59	5.197	8.808	5	22
Debong Kidul	0,35	5.187	14.820	4	20
Tunon	0,75	5.759	7.679	4	21
Keturen	0,62	4.207	6.785	3	17
Debong Kulon	0,74	4.816	6.508	4	18
Debong Tengah	1,11	12.647	11.394	6	35
Randugunting	1,38	17.715	12.837	12	89
Tegal Timur	6,36	75.020	11.796	41	361
Kejambon	0,86	11.754	13.667	6	43
Slerok	1,39	15.088	10.855	6	45
Panggung	2,23	27.784	12.459	14	137
Mangkukusuman	0,47	4.810	10.234	4	42
Mintaragen	1,41	15.584	11.052	11	94
Tegal Barat	15,13	62.979	4.163	41	279
Pesurungan Kidul	0,72	5.237	7.274	2	14
Debong Lor	0,56	3.899	6.963	3	15
Kemandungan	0,56	3.683	6.577	3	13
Pekauman	0,96	7.555	7.870	8	50
Kraton	1,23	14.311	11.635	8	65
Tegalsari	2,19	21.878	9.990	14	107
Muarareja	8,91	6.416	720	3	15
Margadana	11,76	46.086	3.919	35	192
Kaligangsa	2,53	9.735	3.848	7	38
Krandon	1,2	4.513	3.761	4	22
Cabawan	1,28	4.267	3.334	4	17
Margadana	2,41	11.716	4.861	11	49
Kalinyamat Kulon	1,52	4.553	2.995	4	27
Sumurpanggung	1	6.542	6.542	2	18
Pesurungan Lor	1,82	4.760	2.615	3	21
JUMLAH	39,68	243.730	6.142	159	1.071

Sumber: Kota Tegal dalam Angka Tahun 2012

Adapun mata pencaharian penduduk di Kota Tegal cukup beragam, terdiri atas pedagang, petani, buruh tani, buruh industri, angkutan, dan PNS. Proporsi paling besar adalah penduduk yang bermatapencaharian sebagai pedagang

(25.331 orang), dan buruh bangunan (22.178 orang). Tabel berikut memerinci jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kota Tegal berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Kecamatan				Jumlah
	Tegal Selatan	Tegal Timur	Tegal Barat	Margadana	
Petani	381	218	402	1.590	2.591
Buruh Pertanian	1.476	786	213	2.258	4.733
Nelayan	129	3.976	9.198	129	13.432
Pengusaha	342	1.037	365	724	2.468
Buruh Industri	4.307	7.370	3.633	1.384	16.694
Buruh Bangunan	4.728	5.120	2.911	1.959	14.718
Pedagang	5.204	5.779	4.629	11.530	27.142
Pengangkutan	819	2.432	1.257	1.284	5.792
PNS/TNI	1.328	3.669	1.692	542	7.231
Pensiunan	1.688	2.690	1.354	215	5.947
Lainnya	6.209	6.197	6.078	2.442	20.926
Jumlah	26.611	39.274	31.732	24.057	

Sumber: Kota Tegal dalam Angka 2012

Sebagian penduduk Kota Tegal saat ini belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan peluang yang ada. Jumlah pencari kerja yang terdata dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Tegal Tahun 2008-2012

Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
SD	68	92	62	56	26
SLTP	202	173	212	197	112
SLTA	3.668	2.709	3.454	2.451	2.161
Sarjana Muda	949	630	452	188	297
Sarjana	1.565	997	713	171	352
Jumlah	6.452	4.601	4.893	3.063	2.948

Sumber: Kota Tegal dalam Angka 2012

Data dalam tabel di atas menginformasikan bahwa jumlah pencari kerja terdidik di Kota Tegal fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SLTA memiliki proporsi paling besar dibanding pencari kerja berlatar belakang pendidikan lainnya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan pencari kerja sudah semakin baik, tetapi tidak diimbangi dengan perbaikan daya serap lapangan kerja. Kondisi ini memerlukan pemikiran strategik untuk pemberdayaan generasi muda.

B. Deskripsi Data Primer

1. Profil Responden

Responden penelitian ini berjumlah 68 orang, terdiri atas 34 perempuan dan 34 laki-laki. Usia termuda responden adalah 19 tahun, dan tertua 92 tahun, dengan rentang sebagaimana disajikan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7. Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur	f	%
19-22	4	5,89
23-36	19	27,94
37-40	8	11,76
41-54	16	23,53
55-68	16	23,53
69>	5	7,35
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Lebih dari 27% responden berumur 23-26 tahun, selanjutnya sekitar 23,53% responden yang berumur 41-54 dan 55-68 tahun. Selebihnya adalah responden yang berumur 37-40 tahun (11,76%); 69 tahun atau lebih (7,35%); dan 19-22 tahun (5,89%). Adapun ragam pekerjaan responden disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	f	%
Pedagang/Warteg	19	27,94
Wiraswasta	15	22,06
Pegawai Swasta	8	11,76
Petani	3	4,41
Buruh/Supir/Tukang Ojeg	4	5,88
Ibu rumah tangga	11	16,17
Mahasiswa	1	1,49
Lainnya	7	10,29
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Angka-angka dalam tabel 4.8 menginformasikan keragaman responden berdasarkan sumber nafkahnya. Sekitar 27,94% adalah pedagang termasuk pedagang warteg; 22% wiraswasta; 16,17% ibu rumah tangga; 11,76% karyawan swasta; 5,88% buruh/supir/tukang ojeg; 4,41% petani; dan sekitar

11%-nya adalah mahasiswa dan pekerja lainnya. Pada tabel selanjutnya diringkaskan data latar belakang pendidikan responden.

Tabel 4.9. Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	f	%
Tidak sekolah	9	13,23
SD	32	47,06
SMP	11	16,76
SMA	14	20,59
D3/Sarjana	2	2,36
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Informasi yang direpresentasi dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa hampir separuh (47,06%) responden berpendidikan SD. Selain itu terdapat pula 20,59% responden berpendidikan SMA; 16,76% SMP; 13,23% tidak sekolah; dan hanya 2,36% yang berpendidikan Diploma atau Sarjana.

2. Partisipasi Responden dalam Pemilu

Selain umur, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan tersebut, sebagian besar responden pun menyatakan melaksanakan hak pilihnya pada pemilu 2014, dan sebagian kecil tidak melaksanakan hak pilih karena alasan-alasan non-politis. Untuk lebih jelasnya partisipasi responden tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.10. Partisipasi Responden dalam Pemilu 2014

Partisipasi	TPS	Pileg 2014	%	Pilpres 2014	%
Memilih	Tegal	47	69,12	51	75,00
	Jakarta	6	8,82	9	13,23
Tidak Memilih		15	22,06	8	11,77
Jumlah		68	100	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Diinformasikan oleh data dalam tabel di atas bahwa pada pemilu legislatif 2014, terdapat 22,06% responden yang tidak memilih; 69,12% memilih di Tegal; dan 8,82% memilih di Jakarta. Selanjutnya, dalam pemilu presiden 2014 terdapat 11,77% responden yang menyatakan tidak melaksanakan hak pilih; 75% memilih di Tegal; dan 13,23% memilih di Jakarta. Apakah responden yang memilih dan tidak memilih pada pemilu 2014 tersebut mengetahui tentang adanya informasi penting pemilu dari lembaga resmi? Terhadap pertanyaan

tersebut 58 (85,29%) responden menyatakan mengetahuinya; dan 10 (14,71%) responden menyatakan tidak mengetahui.

Tabel 4.11. Pengetahuan Responden tentang Adanya Informasi Menjelang Pemilu

Jawaban	f	%
Mengetahui	58	85,29
Tidak Mengetahui	10	14,71
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Kegiatan yang lazim dilakukan menjelang pemilu adalah pertemuan-pertemuan yang melibatkan anggota masyarakat dalam rangka rembukan atau sosialisasi tentang pemilu, yang diselenggarakan oleh KPU atau instansi lain yang terkait dengan pemilu. Data empirik menunjukkan bahwa kehadiran masing-masing responden dalam kegiatan tersebut berbeda satu sama lain, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.12. Kehadiran Responden dalam Pertemuan/Rembugan/Sosialisasi Pemilu

Jawaban	f	%
Selalu hadir	13	19,12
Sering hadir	7	10,29
Kadang-kadang hadir	15	22,06
Jarang hadir	2	2,95
Tidak pernah hadir	31	45,58
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Berdasarkan data di atas tampak bahwa hampir separuh (45,58%) responden menyatakan tidak pernah menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu. Sekitar 22,06% menyatakan kadang-kadang menghadiri; 10,29% sering menghadiri; dan 19,12% responden menyatakan selalu menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu. Terdapat pula 2,95% responden yang menyatakan jarang menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu.

Selain pertemuan sosialisasi, menjelang pemilu biasanya terdapat beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh parpol atau kontestan pemilu. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa kegiatan sosial, kegiatan rekreatif, kunjungan ke tokoh masyarakat, dan aneka hiburan untuk masyarakat. Seperti halnya kehadiran responden dalam sosialisasi pemilu, intensitas

kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan itu pun berbeda. Untuk lebih ringkasnya, data tersebut disajikan dalam tabel 4.13.

Tabel 4.13. Keikutsertaan Responden dalam Kegiatan Menjelang Pemilu

Jawaban	f	%
Ya, saya selalu ikut	3	4,41
Sering ikut	5	7,36
Kadang-kadang ikut	6	8,82
Jarang ikut	5	7,35
Tidak pernah ikut	49	72,06
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Data dalam tabel di atas menginformasikan bahwa sebagian besar (72,06%) responden menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan menjelang pemilu. Selebihnya adalah responden yang menyatakan selalu mengikuti (4,41%); sering mengikuti (7,36%); kadang-kadang mengikuti (8,82%); dan jarang mengikuti (7,35%).

Rendahnya kehadiran para responden dalam pertemuan sosialisasi dan beragam kegiatan menjelang pemilu, tidak mencerminkan rendahnya sikap kritis mereka terhadap kontestan pemilu. Data empirik yang disajikan dalam tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebagian responden cenderung mempertimbangkan mutu calon atau kontestan pemilu.

Tabel 4.14 Kecenderungan Responden atas Mutu Calon yang Akan Dipilih dalam Pemilu

Jawaban	f	%
Ya, saya selalu mempertimbangkannya	13	19,12
Sering memperbincangkannya	18	26,47
Kadang-kadang memperbincangkannya	9	13,24
Jarang memperbincangkannya	10	14,70
Tidak pernah memperbincangkan apalagi mempertimbangkannya	18	26,47
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Diinformasikan oleh data dalam tabel di atas bahwa berkenaan dengan mutu calon wakil rakyat atau calon pemimpin, terdapat 19,12% responden yang selalu mempertimbangkannya; masing-masing 26,47% menyatakan sering dan tidak pernah memperbincangkannya; 14,70% jarang memperbincangkannya; dan 13,24% responden kadang-kadang memperbincangkannya.

Tabel 4.15. Keyakinan Responden: Pemilu Dapat Memperbaiki Kesejahteraan

Jawaban	f	%
Ya, sangat yakin	11	16,18
Yakin	27	39,70
Ragu-ragu	12	17,64
Tidak yakin	13	19,12
Tidak tahu	5	7,36
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Selanjutnya, kepada responden dipertanyakan pula mengenai taraf keyakinan mereka akan makna pemilu bagi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Data empirik yang terkumpul menunjukkan kontinum sikap responden dari tidak tahu sampai dengan sangat meyakini bahwa pemilu dapat memperbaiki kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya, data yang dimaksud disajikan dalam tabel 4.15.

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 4.15, tampak bahwa lebih dari separuh responden meyakini (39,70%) dan sangat meyakini (16,18%) bahwa pemilu dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Selebihnya, menyatakan ragu-ragu (17,64%); tidak yakin (19,12%); dan tidak tahu (7,36%) bahwa pemilu dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Senada dengan taraf keyakinan tersebut, responden penelitian ini pun memiliki tingkat harapan yang beragam terhadap pemilu sebagai jalan menuju perbaikan kesejahteraan rakyat. Keragaman harapan responden tersebut diringkaskan dalam tabel 4.16.

Tabel 4.16. Harapan Responden: Pemilu sebagai Jalan Menuju Perbaikan Kesejahteraan

Jawaban	f	%
Ya, harapan saya sangat besar	28	41,17
Harapan saya cukup besar	15	22,07
Harapan saya biasa-biasa saja	21	30,88
Harapan saya sangat kecil	3	4,41
Saya tidak punya harapan perbaikan dari adanya Pemilu	1	1,47
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Ternyata, menurut data dalam tabel di atas, sekitar 63,24% responden memiliki harapan yang positif (harapan sangat besar 41,7%; cukup besar 22,07%) terhadap makna pemilu sebagai jalan menuju perbaikan kesejahteraan. Selain itu, terdapat 30,88% responden yang harapannya biasa-biasa saja; 4,41%

harapannya sangat kecil; dan seorang (1,47%) responden menyatakan tidak punya harapan perbaikan dari adanya pemilu.

Isu yang sering mengemuka hampir dalam setiap kali Pemilu adalah kecenderungan politik uang atau pemberian uang saweran dari kontestan kepada masyarakat pemilih. Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa penggunaan hak pilih dalam pemilu sangat bergantung pada uang saweran. Terhadap anggapan tersebut sebagian besar responden tidak menyetujuinya, sebagaimana diperinci dalam tabel 4.17.

Tabel 4.17. Sikap Responden: Penggunaan Hak Pilih Tergantung pada Uang Saweran

Jawaban	f	%
Sangat tidak setuju	26	38,22
Tidak setuju	34	50,00
Kurang setuju	4	5,88
Setuju	2	2,95
Sangat setuju	2	2,95
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Data di atas menginformasikan bahwa sekitar 38,22% dan 50% responden masing-masing menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pendapat bahwa penggunaan hak pilih rakyat bergantung pada uang saweran yang diberikan oleh kontestan pemilu sebelum pencoblosan. Hanya sebagian kecil saja, yaitu 5,88% menyatakan kurang setuju; dan masing-masing 2,95% responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap anggapan seperti itu.

Kecenderungan penyikapan yang sama diungkap pula sehubungan dengan pendapat bahwa para calon pemimpin atau kontestan pemilu tidak pernah menepati janji-janji yang mereka utarakan sewaktu berkampanye. Variasi sikap responden mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.18.

Tabel 4.18. Sikap Responden: Janji Kampanye Tidak Pernah Ditepati oleh Pemimpin

Jawaban	f	%
Sangat tidak setuju	6	8,82
Tidak setuju	10	14,71
Kurang setuju	14	20,59
Setuju	33	48,52
Sangat setuju	3	4,41
Tidak menjawab	2	2,95
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Proporsi responden yang setuju (48,52%) dan sangat setuju (4,41%) terhadap pendapat bahwa janji-janji kampanye tidak pernah ditepati oleh pemimpin terpilih, merupakan informasi yang menarik terutama karena hal tersebut dinyatakan oleh lebih dari separuh responden. Meskipun demikian, ditemukan pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju (8,82%); tidak setuju (14,71%); kurang setuju (20,59%); dan tidak menjawab (2,95%).

Hal lain yang juga memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu adalah pendapat atau sinisme bahwa pemilu itu tidak penting karena lebih banyak melahirkan pemimpin yang korup. Responden penelitian ini pun diminta menyikapi pendapat tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel 4.19.

Tabel 4.19. Sikap Responden: Pemilu Tidak Penting Karena Lebih Banyak Melahirkan Pemimpin Korup

Jawaban	f	%
Sangat tidak setuju	14	20,59
Tidak setuju	27	39,68
Kurang setuju	15	22,07
Setuju	10	14,71
Sangat setuju	0	0
Tidak menjawab	2	2,95
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Ternyata sikap sebagian responden terhadap *output* pemilu (pemimpin atau wakil rakyat terpilih) tergolong positif. Bukti empirik yang dituangkan dalam tabel di atas, menginformasikan bahwa sekitar 39,68% responden tidak menyetujui anggapan pemilu itu tidak penting karena lebih banyak melahirkan pemimpin yang korup. Selain itu, sekitar 20,59% menyatakan sangat tidak setuju, dan 22,07% kurang setuju terhadap anggapan tersebut. Meskipun demikian, terdapat 14,71% responden yang menyetujuinya dan 2,95% responden yang tidak menjawab.

Pelaksanaan hak pilih pada sebagian anggota masyarakat seringkali terbatalan karena keterpaksaan oleh kepentingan atau urusan-urusan rutinitas nafkah atau usaha ekonomi mereka. Apakah kondisi tersebut paralel dengan penyikapan responden tentang tidak pentingnya memberikan suara di TPS daripada mencari nafkah? Jawaban atau penyikapan responden atas pertanyaan ini diringkaskan dalam tabel 4.20

Tabel 4.20. Sikap Responden: Memberikan Suara di TPS Tidak Lebih Penting daripada Mengurus Nafkah

Jawaban	f	%
Sangat tidak setuju	4	5,88
Tidak setuju	47	69,10
Kurang setuju	13	19,12
Setuju	2	2,95
Sangat setuju	2	2,95
Jumlah	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Data empirik dalam tabel 4.20 menginformasikan bahwa sebagian besar (69,10%) responden tidak menyetujui anggapan yang menafikan pentingnya memberikan suara di TPS daripada mengurus rutinitas pencarian nafkah. Di samping itu, ada 5,88% reponden yang menyatakan sangat tidak setuju dan 19,12% responden yang kurang setuju atas anggapan tersebut. Di pihak lain, hanya masing-masing 2,95% responden saja yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap anggapan tersebut.

Selain tuntutan rutinitas pencarian nafkah, tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu seringkali pula dikaitkan dengan kualitas proses pemilu dan kualitas kinerja penyelenggara pemilu. Sebagian anggota masyarakat menduga bahwa pemilu di daerah tidak lagi berlangsung jujur dan adil, juga cara kerja penyelenggara pemilu di daerah tidak memuaskan. Dugaan ini pun dikonfirmasi kepada responden penelitian ini, dan menghasilkan data empirik yang tersaji dalam tabel 4.21.

Tabel 4.21. Sikap Responden: Pemilu Tidak Jurdil dan Cara Kerja Penyelenggara Tidak Memuaskan

Jawaban	Pemilu di Daerah Tidak Lagi Berlangsung Jujur dan Adil		Cara Kerja Penyelenggara Pemilu di Daerah Tidak Memuaskan	
	f	%	f	%
Sangat tidak setuju	8	11,77	11	16,17
Tidak setuju	45	66,16	45	66,18
Kurang setuju	5	7,36	7	10,29
Setuju	10	14,71	3	4,41
Sangat setuju	0	0	2	2,95
Jumlah	68	100	68	100

Sumber: Data Angket, diolah

Informasi yang tersirat dari perincian angka-angka dalam tabel di atas meliputi dua aspek. Pertama, sebagian besar responden kurang setuju, tidak

setuju, dan sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa pemilu di daerah berlangsung tidak jujur. Hanya sebagian kecil saja yang menyetujuinya. Kedua, sebagian besar responden juga kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa cara kerja penyelenggara pemilu di daerah berlangsung tidak memuaskan. Hanya sebagian kecil saja yang menyetujuinya.

C. Interpretasi

1. Karakteristik Sosial dan Psikologi Masyarakat Pemilih

Sejauh direpresentasi oleh data primer, maka masyarakat pemilih di Kelurahan Krandon dan Cabawan memiliki usia yang beragam. Termuda responden adalah 19 tahun, dan tertua 92 tahun. Proporsi dan komposisinya adalah sebagai berikut: lebih dari 27% responden berumur 23-26 tahun, masing-masing 23,53% responden yang berumur 41-54 dan 55-68 tahun; 11,76% responden yang berumur 37-40 tahun ; 7,35% responden berumur 69 tahun atau lebih; dan 5,89% berumur 19-22 tahun. Komposisi usia seperti itu secara sosial psikologis mencerminkan bahwa rata-rata anggota masyarakat di daerah penelitian memiliki daya apresiasi dan emosi yang positif terhadap pemilu.

Apabila dilihat dari keragaman mata pencahariannya, maka dapat dinyatakan bahwa anggota masyarakat di daerah penelitian pada umumnya merupakan kelompok yang lebih “terdesak” oleh keharusan atau rutinitas pencarian nafkah keluarga daripada menyempatkan diri mengikuti kepolitikan. Meskipun demikian, dalam penelitian ini kondisi sosial psikologis tersebut ternyata tidak dapat dijadikan penjelas atas tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dilihat dari latar belakang pendidikan formalnya, hampir separuh (47,06%) responden berpendidikan SD. Selain itu terdapat pula 20,59% responden berpendidikan SMA; 16,76% SMP; 13,23% tidak sekolah; dan hanya 2,36% yang berpendidikan Diploma atau Sarjana.

Seperti halnya mata pencaharian, maka latar belakang pendidikan formal pun tidak dapat memberi penjelasan yang memadai terhadap tinggi rendahnya

partisipasi masyarakat dalam pemilu di daerah penelitian. Dalam pemilu legislatif legislatif 2014, terdapat 22,06% responden yang tidak memilih; 69,12% memilih di Tegal; dan 8,82% memilih di Jakarta. Dalam pemilu presiden 2014 terdapat 11,77% responden yang tidak melaksanakan hak pilih; 75% memilih di Tegal; dan 13,23% memilih di Jakarta.

Apakah responden yang memilih dan tidak memilih pada pemilu 2014 tersebut mengetahui tentang adanya informasi penting pemilu dari lembaga resmi? Terhadap pertanyaan tersebut 58 (85,29%) responden menyatakan mengetahuinya; dan 10 (14,71%) responden menyatakan tidak mengetahui.

Hampir separuh (45,58%) responden menyatakan tidak pernah menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu. Sekitar 22,06% menyatakan kadang-kadang menghadiri; 10,29% sering menghadiri; dan 19,12% responden menyatakan selalu menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu. Terdapat pula 2,95% responden yang menyatakan jarang menghadiri pertemuan sosialisasi pemilu.

Sebagian besar (72,06%) responden menyatakan tidak pernah mengikuti kegiatan menjelang pemilu. Selebihnya adalah responden yang menyatakan selalu mengikuti (4,41%); sering mengikuti (7,36%); kadang-kadang mengikuti (8,82%); dan jarang mengikuti (7,35%).

Terdapat 19,12% responden yang selalu mempertimbangkannya; masing-masing 26,47% menyatakan sering dan tidak pernah memperbincangkannya; 14,70% jarang memperbincangkannya; dan 13,24% responden kadang-kadang memperbincangkannya.

Ternyata sikap sebagian responden terhadap *output* pemilu (pemimpin atau wakil rakyat terpilih) tergolong positif. Bukti empirik menginformasikan bahwa sekitar 39,68% responden tidak menyetujui anggapan pemilu itu tidak penting karena lebih banyak melahirkan pemimpin yang korup. Selain itu, sekitar 20,59% menyatakan sangat tidak setuju, dan 22,07% kurang setuju terhadap anggapan tersebut. Meskipun demikian, terdapat 14,71% responden yang menyetujuinya dan 2,95% responden yang tidak menjawab.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Institusi Pemilu

Data di atas menginformasikan bahwa sekitar 38,22% dan 50% responden masing-masing menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap pendapat bahwa penggunaan hak pilih rakyat bergantung pada uang saweran yang diberikan oleh kontestan pemilu sebelum pencoblosan. Hanya sebagian kecil saja, yaitu 5,88% menyatakan kurang setuju; dan masing-masing 2,95% responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap anggapan seperti itu.

Proporsi responden yang setuju (48,52%) dan sangat setuju (4,41%) terhadap pendapat bahwa janji-janji kampanye tidak pernah ditepati oleh pemimpin terpilih, merupakan informasi yang positif terutama karena dinyatakan oleh lebih dari separuh responden. Meskipun demikian, ditemukan pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju (8,82%); tidak setuju (14,71%); kurang setuju (20,59%); dan tidak menjawab (2,95%).

Informasi yang tersirat dari perincian angka-angka dalam tabel di atas meliputi dua aspek. Pertama, sebagian besar responden kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa pemilu di daerah berlangsung tidak jujur. Hanya sebagian kecil saja yang menyetujuinya. Kedua, sebagian besar responden juga kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap anggapan bahwa cara kerja penyelenggara pemilu di daerah berlangsung tidak memuaskan. Hanya sebagian kecil saja yang menyetujuinya.

3. Harapan Masyarakat terhadap Pemilu

Data empirik menginformasikan bahwa sebagian besar (69,10%) responden tidak menyetujui anggapan yang menafikan pentingnya memberikan suara di TPS daripada mengurus rutinitas pencarian nafkah. Di samping itu, ada 5,88% responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan 19,12% responden yang kurang setuju atas anggapan tersebut. Di pihak lain, hanya masing-masing 2,95% responden saja yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap anggapan tersebut.

Lebih dari separuh responden meyakini (39,70%) dan sangat meyakini (16,18%) bahwa pemilu dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat. Selebihnya,

menyatakan ragu-ragu (17,64%); tidak yakin (19,12%); dan tidak tahu (7,36%) bahwa pemilu dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Sekitar 63,24% responden memiliki harapan yang positif (harapan sangat besar 41,7%; cukup besar 22,07%) terhadap makna pemilu sebagai jalan menuju perbaikan kesejahteraan. Selain itu, terdapat 30,88% responden yang harapannya biasa-biasa saja; 4,41% harapannya sangat kecil; dan seorang (1,47%) responden menyatakan tidak punyai harapan perbaikan dari adanya pemilu.

D. Pembahasan

Masyarakat akan merasa peka dan melibatkan diri dalam kegiatan politik apabila telah mempunyai sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang cukup mengenai politik (Milbrath, 1965:68). Bagi mereka yang sudah memiliki pemahaman politik, tentu akan memilih secara bebas dan jujur menurut hati nuraninya.

Sehubungan dengan itu, pemilu memuat sejumlah nilai substantif berikut ini. Pemilu adalah sebuah proses berpolitik yang terpenting, karena akan berpengaruh bagi penentuan kekuasaan dan kepemimpinan politik.

Selain itu, pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokrasi modern. Pemilu menjadi salah satu parameter utama pengakuan masyarakat internasional mengenai demokratis atau tidaknya suatu negara. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses sekaligus sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemilu merupakan proses sirkulasi elit yang bersifat inklusif di mana semua warga secara terbuka memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Melalui prosesi pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan beragam harapan, keinginan, dan berbagai kepentingannya melalui pilihan-pilihan politiknya yang disalurkan dalam pemilu.

Secara idealitas-normatif, melalui mekanisme pemilu inilah masyarakat menentukan pilihan haluan kehidupan bernegara secara paripurna. Karena

itulah dalam konteks pemilu, masyarakat sebagai pemilih memiliki urgensi tersendiri.

Membaiknya pengetahuan, sikap, dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi-politik pada dasarnya memerlukan kondisi yang baik pula dalam status sosial ekonomi, pendidikan, dan aksesibilitas informasi. Ditandakan oleh Cahyono (1998:151) misalnya, bahwa perubahan status sosial ekonomi, pendidikan dan kemudahan sistem informasi media masa yang gencar dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat.

Kemajuan pendidikan dan berfungsinya sistem informasi sangat mempeluangi minat masyarakat mengenal konsep-konsep demokrasi dan kesadaran untuk melibatkan diri dalam proses demokrasi. Menurut Rauf (1998:12), ketika warga negara telah memiliki pengetahuan politik akan diiringi oleh kesadaran untuk ikut terlibat berpartisipasi politik seperti ikut memilih dalam pemilu dan menegakkan sistem demokrasi yang terus berkembang ke arah demokrasi yang ideal.

Hasil penelitian ini pun, sebagaimana telah dideskripsikan di atas, pada prinsipnya mengisyaratkan pentingnya pemupukan rasa tanggung jawab, motivasi, minat, dan persepsi masyarakat yang baik terhadap proses, luaran, dan kemaslahatan pemilu.

Dari segi interaksi dan relasi para antar-pemangku kepentingan pemilu, kondisi di atas meniscayakan dipelihara posisi kesetaraan --bahkan posisi yang paling diuntungkan-- masyarakat pemilih dengan posisipeserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu, dan pemantau. Pentingnya menjamin kesetaraan posisi antara pemilih dengan stakeholders pemilu lainnya, dapat dimengerti karena di tengah-tengah kepentingan yang begitu besar, kepentingan pemilih justru tertinggal dan hampir terlupakan.

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan diskusi Perludem (2014), bahwa pemilih hanya diposisikan sebagai objek dalam pertarungan politik antar peserta pemilu baik partai politik maupun kandidat. Begitu pula dengan kepentingan pemilih untuk memberikan hak suara berdasarkan informasi yang memadai,

akses terbuka terhadap rekam jejak peserta pemilu, akses terbuka terhadap informasi kepemiluan, bebas dari intimidasi dan mobilisasi yang sesungguhnya belum dikelola secara memadai, intensif, dan berkualitas.

Belum terakomodasinya kepentingan pemilih tersebut pada gilirannya mengondisikan sikap skeptis bahkan apatisme masyarakat terhadap proses pemilu. Sekaitan dengan terakomodasi atau tidaknya kepentingan pemilih itu, terdapat faktor politik dan faktor nonteknis yang mendeterminasi partisipasi pemilih. Kombinasi kedua faktor tersebut menentukan tingkat partisipasi pemilih.

Hal-hal yang termasuk dalam faktor politik misalnya kinerja yang ditunjukkan oleh partai politik, lembaga legislatif, pejabat publik, jalannya pemerintahan, dampak kebijakan, yang semuanya dapat dirasakan, direspons, dan diamati oleh masyarakat/pemilih. Dalam hal ini pemilu dilihat sebagai sebuah siklus dari periode pemilihan, keterpilihan, berjalannya pemerintahan, lalu kembali lagi pada periode pemilihan dan seterusnya dimana pemilih melakukan asesmen secara terus menerus terhadap proses politik yang ada.

Adapun faktor teknis terkait langsung dengan periode pemilihan yaitu penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses geografis), aman (tanpa ancaman), dan tepat (paham cara menandai surat suara).

KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dapat terfasilitasi secara baik, dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung dengan jujur. Artinya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya.

KPU tidak terkait secara langsung dengan soal kinerja partai politik dan kondisi politik yang telah mempengaruhi partisipasi masyarakat. Posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggungjawab terhadap persoalan partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh persoalan teknis penyelenggaraan pemilu.

Ketika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya akibat absennya informasi tentang mekanisme pemilihan atau hari pemungutan suara yang disampaikan oleh KPU maka tentu menjadi tanggungjawab penyelenggara. Berdasarkan hal itu maka menjadi tidak cukup relevan jika kemudian soal tinggi rendahnya partisipasi pemilih hanya menjadi tanggungjawab KPU. Begitu juga dengan target tingkat partisipasi pemilih hingga 75%.

Hasil penelitian ini mengisyaratkan pula tentang masih pentingnya pendidikan politik terutama bagi generasi muda. Aspek esensial pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi muda terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, pendidikan politik merupakan proses penanaman nilai-nilai di bidang politik yang dilakukan secara sengaja, baik formal maupun informal, terus-menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara demokratis dan bertanggung jawab.

Adapun pelaksanaan pendidikan politik haruslah dilakukan tanpa paksaan, dan berfokus pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan kecakapan warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

Pendidikan politik diperlukan terutama untuk mendidik generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, agar mereka memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Oleh karena itu, terdapat sekurang-kurangnya tiga tujuan pendidikan politik yang satu sama lain tidak terpisahkan.

Pertama, pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Kedua, pendidikan politik untuk membentuk kesadaran berpolitik masyarakat. Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah

kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985).

Ketiga, pendidikan politik membentuk partisipasi berpolitik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Partai politik memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kewajiban ini sejalan dengan peran partai politik sebagai pilar penyangga demokrasi. Selain itu, UU No.2 Tahun 2008, menegaskan bahwa partai politik ditujukan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan formal dan media massa pun memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik. Peran media massa dan lembaga atau asosiasi dalam masyarakat tidak kalah penting untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengambil bagian berdemokrasi secara bebas dan bertanggung jawab.

Akhirnya, apapun bentuk pendidikan politik yang digunakan, aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

BAB 5

Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi, interpretasi, dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan dalam bab keempat laporan ini, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor sosial psikologis yang diduga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan adalah latar belakang pendidikan formal mereka. Sedangkan umur, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin, secara umum tidak dapat dijadikan variabel penjelas atas partisipasi tersebut.
2. Persepsi masyarakat Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan terhadap institusi pemilu adalah positif. Sebagian besar responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap pandangan, pendapat, dan penilaian tentang politik uang, inkonsistensi janji-janji kampanye, pemilu tidak jujur, dan kinerja penyelenggara pemilu tidak memuaskan.
3. Taraf keyakinan dan pengharapan masyarakat Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan terhadap pemilu adalah positif. Sebagian besar responden menilai bahwa pemberian suara di TPS pada saat pemilu lebih utama daripada rutinitas mencari nafkah. Mereka juga sangat meyakini arti pemilu bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

B. Rekomendasi

Selain simpulan tersebut di atas, hasil penelitian ini pun merekomendasikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemupukan rasa tanggung jawab, motivasi, minat, dan persepsi masyarakat yang baik terhadap proses, luaran, dan kemaslahatan pemilu. Dari segi interaksi dan relasi para antar-pemangku kepentingan pemilu, kondisi di atas meniscayakan dipelihara posisi kesetaraan --bahkan posisi yang paling

diuntungkan-- masyarakat pemilih dengan posisipeserta pemilu, pemerintah, penyelenggara, lembaga pengawas pemilu, dan pemantau. Pentingnya menjamin kesetaraan posisi antara pemilih dengan stakeholders pemilu lainnya, dapat dimengerti karena di tengah-tengah kepentingan yang begitu besar, kepentingan pemilih justru tertinggal dan hampir terlupakan.

2. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses geografis), aman (tanpa ancaman), dan tepat (paham cara menandai surat suara). KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dapat terfasilitasi secara baik, dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung dengan jujur. Artinya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya.
3. Pendidikan politik terutama bagi generasi muda. pendidikan politik merupakan proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, baik formal maupun informal, terus-menerus dari generasi ke generasi, agar warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara demokratis dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
- Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2013. Kota Tegal dalam Angka 2012.
- Bolgherini, Silvia, "*Participation*" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, 2010. *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*. Chicago: The University of Chicago
- Cahyono, Heru. 1998. "Pemilu dan Pendidikan Politik" dalam Mochtar Pabotingi, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eep Saefulloh Fatah dalam Hery M.N. Fathah, Fenomena Golput dan Krisis Kepercayaan, <http://lampungpost.com>
- Komisi Pemilihan Umum. 2015. "Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu", *Surat Dinas*, Nomor 155/KPU/IV/2015 (6 April, 2015). Jakarta
- Milbrath, Lester. 1965. *Political Participation, How and Way, Do get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally.
- Ndraha, T. 1990. *Pengembangan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Perludem. 2014. "Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2014: Rekomendasi atas Hasil Workshop Knowledge Sharing", tersedia [online] <http://www.perludem.or.id>, diunduh Juli 2015
- Rauf, Maswadi. 1991. "Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik". *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: UI
- Saefullah, Eep. 1997. *Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Hasanuddin M. 2007. "Perilaku Tidak Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Riau: Suatu Bahasan Awal" , *Makalah Seminar Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Riau* (2 September 2007).
- Samuel, Huntington dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (terjemahan: Sahat Simamora), Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanit, Arbi (Eds). 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soetomo, 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.